

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan cita-cita kemerdekaan untuk mewujudkan bangsa yang maju, sejahtera, cerdas, tertib, berakhlak mulia, damai abadi, dan adil. Negara memiliki peran penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas agar dapat bersaing dalam era globalisasi, sehingga mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dinamika globalisasi akan menciptakan Indonesia menjadi bangsa yang berintegritas, cerdas, dan kompetitif, yang pada akhirnya akan meraih visi Indonesia sebagai negara emas pada tahun 2045 serta mencapai cita-cita negara (Hidayat, 2021).

Pengangguran merupakan masalah serius di Indonesia yang masih sulit diatasi, berbagai program pengurangan pengangguran yang dijalankan pemerintah belum berhasil mengurangi pengangguran secara signifikan (Yusuf & Sutanti, 2020). Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk Indonesia yang besar tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 menyebutkan bahwa salah satu visi misi presiden tahun 2020-2024 adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia dan kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2019) menyebutkan bahwa terdapat lima prioritas kerja Presiden untuk periode 2019-2024, prioritas kedua adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta. Presiden, melalui Sekretariat Kabinet RI (2020), menekankan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pendidikan vokasi menempati posisi penting dalam strategi pengembangan SDM.

Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia terus dilakukan seiring dengan perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi. Sekolah menjadi institusi utama dalam sistem pendidikan nasional yang memiliki

peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif, kompetitif, dan relevan dengan kebutuhan masa depan (Budiharto et al., 2018). Dalam konteks tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Rencana Strategis Tahun 2020–2024 menegaskan tanggung jawab pembangunan sumber daya manusia sebagai upaya kolektif seluruh komponen bangsa, yang diselaraskan dengan Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 serta Visi Indonesia Emas 2045 (Kemendikbud, 2020). Pada periode tersebut, visi pembangunan pendidikan diarahkan untuk mendukung terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, yang ditandai dengan terbentuknya karakter peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, mampu bergotong royong, serta memiliki wawasan kebinekaan global.

Seiring dengan dinamika kebijakan pendidikan nasional, konsep tersebut mengalami penyempurnaan melalui penetapan Profil Lulusan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025. Profil Lulusan merupakan rumusan capaian karakter, kompetensi, dan kecakapan abad ke-21 yang diharapkan dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan satuan pendidikan, sebagai kelanjutan dan penguatan dari konsepsi Profil Pelajar Pancasila. Dengan demikian, orientasi pembangunan pendidikan tidak hanya berfokus pada proses pembelajaran, tetapi juga pada hasil akhir berupa kualitas lulusan yang siap melanjutkan pendidikan, memasuki dunia kerja, serta berkontribusi secara produktif dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan nasional.

Visi kebijakan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan keterpaduan antara tujuan pendidikan, kebutuhan dunia kerja, dan tantangan global melalui penyelenggaraan pendidikan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan (Kemendikbud, 2020). Dalam perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan, pemerintah mengedepankan prinsip inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk satuan pendidikan, dunia usaha dan dunia industri, serta masyarakat luas. Pendekatan kolaboratif ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa program-program strategis pendidikan, termasuk

Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK), benar-benar mampu menghasilkan lulusan yang relevan, adaptif, dan berdaya saing sesuai dengan Profil Lulusan yang ditetapkan secara nasional (Hia et al., 2023).



*Gambar 1. 1 Delapan Dimensi Profil Lulusan*

Pendidikan yang berkualitas akan dapat menciptakan generasi yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan keterampilan yang dapat bersaing di dunia kerja. Pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kecerdasan intelektual individu dalam masyarakat agar mampu mengurus dirinya sendiri, mengembangkan keterampilan yang mendukung kehidupan berkelompok yang harmonis, dan membentuk karakter guna turut serta dalam menghargai dan memajukan peradaban yang berkembang (Essel et al., 2018). Menurut Sufyarma (2016) dalam era globalisasi yang sedang berlangsung saat ini, persaingan dalam hal kualitas menjadi salah satu ciri khas yang paling penting. Di Indonesia regulasi sistem pendidikan nasional ditetapkan melalui berbagai undang-undang dan kebijakan pemerintah, salah satu tingkat pendidikan yang memiliki peran penting dalam menyediakan tenaga kerja terampil adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) (Murniati & Usman, 2019). SMK mendapatkan perhatian dan dukungan yang luas dari berbagai pihak, sudah saatnya bagi SMK untuk bangkit dan mengoptimalkan potensinya (Uno & Nina Lamatenggo, 2022). Keberhasilan pendidikan kejuruan dapat dilihat dari kemampuan menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang spesifik, siap untuk memasuki dunia kerja atau berwirausaha, dan memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi (Irwanto, 2022).

Seiring dengan perubahan zaman dan kompleksitas pasar kerja yang semakin meningkat, pemerintah terus berusaha meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Indonesia agar dapat bersaing secara efektif (Subijanto et al., 2019). Sejalan dengan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan, Presiden menekankan pentingnya perubahan mendasar dalam sistem pendidikan vokasi sebagai upaya mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing tinggi, instruksi ini bertujuan untuk menjawab tantangan globalisasi dan revolusi industri yang semakin kompleks, di mana dunia kerja membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan praktis dan adaptif terhadap perubahan teknologi (Kasman, 2017).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 2020-2024. Selain itu, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17/M/2021 tentang Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK) menjadi dasar hukum lahirnya SMK Pusat Keunggulan yang kemudian disebut SMK PK. Tujuan utama SMK PK adalah untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja atau menjadi wirausaha melalui penyelarasan pendidikan vokasi yang mendalam dengan kebutuhan dunia kerja, serta diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan acuan bagi SMK lainnya.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 03/M-IND/PER/1/2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Kompetensi, merupakan upaya program *Link and Match* antara SMK dan industri ditetapkan pemerintah untuk menghasilkan lulusan SMK yang memenuhi standar DUDI. Peraturan ini mengharuskan SMK untuk membangun dan menyelenggarakan pendidikan kejuruan berbasis kompetensi yang relevan dengan industri, serta menetapkan kewajiban bagi perusahaan industri atau kawasan industri untuk membantu pembinaan dan pengembangan SMK dalam menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten (Junaidah et al., 2023). *Implementasi teaching factory* di SMK dapat menjadi solusi mengatasi kesenjangan

kompetensi antara tuntutan industri dan keterampilan yang diperoleh dari pendidikan di sekolah (Hadlock et al., 2008; Triyanto et al., 2019).

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi payung kebijakan nasional untuk penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah serta penguatan pembangunan sumber daya manusia. Renstra ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 – 2029, dengan arah kebijakan yang menekankan pada pemerataan akses, peningkatan mutu layanan pendidikan, relevansi pendidikan vokasi terhadap kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta penguatan tata kelola kelembagaan pendidikan secara sinergis dan berkelanjutan. Renstra Kemendikdasmen periode ini diharapkan menjadi dasar bagi perencanaan program dan kegiatan kementerian dalam menciptakan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan adaptif terhadap dinamika sosial, teknologi, serta tuntutan pasar kerja, sehingga turut mendukung pencapaian visi *Indonesia Emas 2045* melalui pendidikan vokasi yang relevan dan berkualitas.

SMK PK diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya berkualitas untuk dunia kerja domestik tetapi juga mampu bersaing di pasar global. Di era persaingan global saat ini, pendidikan dituntut untuk terus meningkatkan kualitas kompetitif agar dapat bersaing dalam berpikir dan berinovasi teknologi, sambil tetap mempertahankan karakter sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung nilai-nilai Pancasila (Suprayitno & Wahyudi, 2020). Maka, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berupaya meningkatkan kualitas keahlian kerja dan juga ingin melahirkan lulusan yang berkarakter Pancasila melalui penguatan pendidikan karakter Pancasila (Wala & Koroh, 2022). Globalisasi tidak hanya mempercepat interaksi dan membuat dunia terasa lebih kecil, tetapi juga membawa perubahan dalam masyarakat, termasuk aspek sosial budaya, politik, teknologi, dan pendidikan (David Held, 2005; Yuniarto, 2016).

Pendidikan Vokasi merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam rangka menyiapkan generasi muda untuk memiliki kompetensi dan daya saing di

ranah industri, program SMK Pusat Keunggulan (PK) adalah inisiatif untuk mengembangkan SMK dengan kompetensi keahlian tertentu guna meningkatkan kualitas dan kinerja sekolah (Hanafiah et al., 2024). Program ini diperkuat melalui kemitraan dan penyelarasan dengan dunia usaha, industri dan kerja, sehingga SMK ini menjadi sekolah rujukan yang berperan sebagai sekolah penggerak dan pusat peningkatan kualitas dan kinerja SMK lainnya (Lince, 2022). Terdapat program pendampingan yang dirancang untuk membantu SMK Pusat Keunggulan mencapai hasil yang diharapkan, pendampingan ini dilakukan oleh perguruan tinggi yang memenuhi kriteria tertentu.

SMK PK merupakan kelanjutan dari inisiatif sebelumnya, seperti SMK *Center of Excellence* (CoE) dan Revitalisasi SMK, yang bertujuan untuk mengembangkan SMK dengan fokus pada program keahlian tertentu (Sudjimat, 2022). Program SMK PK memerlukan dukungan dan kolaborasi yang kuat dari dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemerintah daerah, serta perguruan tinggi vokasi sebagai mitra pendamping. Sinergi ini penting agar kurikulum dapat benar-benar selaras dengan kebutuhan keterampilan, standar profesional, dan budaya kerja yang berlaku di DUDI. Penerapan budaya kerja industri di SMK diharapkan mampu membentuk kebiasaan siswa untuk memiliki soft skills yang baik, etos kerja tinggi, serta kemampuan adaptasi terhadap dinamika lingkungan kerja (Ahmanda et al., 2022).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa lulusan SMK Pusat Keunggulan (PK) tidak selalu langsung terserap di dunia kerja maupun berwirausaha. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius, karena berpotensi mengurangi efektivitas program yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif dan siap kerja. Apabila lulusan tidak segera memasuki pasar kerja atau menciptakan lapangan kerja mandiri, maka tujuan utama program, yakni mengurangi angka pengangguran lulusan SMK sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja vokasi, menjadi tidak optimal (Mukti, Nuzuar, & Sumarto, 2023). Dengan demikian, keberhasilan Program SMK PK tidak hanya ditentukan oleh penyusunan kurikulum atau pelaksanaan pembelajaran berbasis industri, tetapi juga oleh sejauh mana dukungan ekosistem pendidikan vokasi mampu memastikan

lulusan benar-benar dapat bertransisi secara mulus dari bangku sekolah ke dunia kerja maupun kewirausahaan.

Apabila lulusan SMK Pusat Keunggulan tidak terserap ke dunia usaha dan dunia industri (DUDI) atau tidak mampu mengembangkan usaha secara mandiri, maka berbagai kerugian strategis dapat terjadi. Program SMK PK pada dasarnya dirancang untuk menyiapkan peserta didik agar siap bekerja atau berwirausaha, sehingga ketidaktercapaian hasil tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama program belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini berimplikasi pada kurang optimalnya pemanfaatan investasi besar yang telah dialokasikan oleh pemerintah, dukungan dunia industri, serta pendampingan dari perguruan tinggi vokasi yang terlibat dalam pelaksanaan program. Selain itu, rendahnya tingkat keterserapan lulusan berpotensi menurunkan kepercayaan dunia usaha dan industri, pemerintah daerah, serta mitra perguruan tinggi terhadap efektivitas Program SMK Pusat Keunggulan. Menurunnya kepercayaan tersebut dapat berdampak pada melemahnya kolaborasi dan dukungan yang sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan program. Lebih jauh, kondisi ini juga berisiko meningkatkan angka pengangguran terdidik, yaitu lulusan SMK yang memiliki keterampilan namun tidak memperoleh pekerjaan yang sesuai atau tidak terdorong untuk berwirausaha, sehingga pada akhirnya menambah beban sosial dan ekonomi bagi masyarakat serta pemerintah (Tessa & Humaedi, 2023; Bahira, 2024).

Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, industri, dan masyarakat, untuk berkolaborasi dalam meningkatkan kualitas lulusan SMK. Langkah strategis yang dilakukan meliputi penyesuaian kurikulum agar relevan dengan kebutuhan industri, peningkatan kualitas pendidik dan fasilitas, serta penguatan hubungan antara SMK dan dunia usaha. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan generasi tenaga kerja yang tidak hanya mampu bersaing di tingkat nasional, tetapi juga siap menghadapi kompetisi di pasar global. Kemudian pemerintah Indonesia merespons dengan merancang program pendidikan yang relevan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh para lulusan SMK melalui Pendidikan Vokasi (Maryanti, 2019), selanjutnya Presiden juga menekankan perlunya peningkatan kualifikasi tenaga kerja melalui pendidikan

agar mereka menjadi tenaga kerja yang terampil dan dapat diabsorpsi sepenuhnya oleh industri dan dunia usaha (Kemendikbud, 2020).

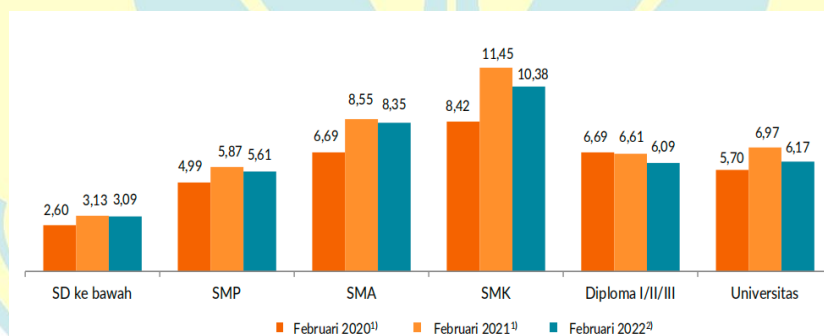
Pendidikan vokasi memiliki posisi strategis dalam menyokong pembangunan ekonomi dan tenaga kerja yang kompeten. SMK sebagai bagian dari sistem pendidikan vokasi diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja dan relevan dengan kebutuhan industri. Namun, data empiris menunjukkan bahwa lulusan SMK masih kerap menghadapi kesulitan memasuki dunia kerja langsung setelah lulus, meskipun berbagai program revitalisasi sudah diterapkan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK secara konsisten menjadi yang tertinggi dibanding jenjang pendidikan lainnya. Misalnya, pada tahun 2022 TPT lulusan SMK mencapai 10,38 %, jauh di atas TPT nasional sebesar 5,83 %. Pada 2024, angka TPT lulusan SMK menurun ke 9,01 %, namun tetap menunjukkan bahwa lulusan SMK termasuk kelompok paling rentan terhadap pengangguran. Selain itu, laporan lain menyebut bahwa pada tahun 2023, SMK masih mendominasi kategori pengangguran terbuka di antara lulusan pendidikan.

Dalam perbandingan regional, beberapa studi menunjukkan bahwa tantangan serupa juga dialami oleh negara tetangga di ASEAN. Misalnya, dalam analisis *Comparing Employability Skills of Technical and Vocational Education Students of Thailand and Malaysia*, ditemukan bahwa tingkat pengangguran lulusan TVET di Thailand dan Malaysia sering dikaitkan dengan ketidakmampuan lulusan dalam memenuhi persyaratan pasar, terutama terkait kemampuan bahasa, komunikasi, dan penyesuaian keterampilan industri. Di Thailand, sistem VET menghadapi tantangan dalam menyelaraskan program pelatihan dengan kebutuhan industri karena keterbatasan mekanisme umpan balik dari dunia usaha dan kurangnya implementasi pembelajaran berbasis kerja (*work-based learning*) secara optimal (Sa-Nguanmanasak & Khampirat, 2019).

Perbandingan data ini menggarisbawahi bahwa fenomena lulusan SMK yang tidak langsung terserap ke dunia kerja bukan hanya masalah lokal, melainkan tantangan sistemik di banyak negara dengan pendidikan vokasi. Oleh karena itu, dalam konteks evaluasi Program SMK Pusat Keunggulan di Kota Metro, penting

untuk tidak hanya menilai aspek input dan proses, tetapi secara tegas mengukur outcome berupa serapan lulusan, relevansi kompetensi terhadap pasar kerja, serta hambatan nyata yang dialami lulusan dalam transisi ke dunia kerja. Data perbandingan ASEAN juga menjadi pengingat bahwa kebijakan vokasi perlu mengakomodasi praktik-praktik terbaik dari negara lain dan memperkuat mekanisme koneksi antara sekolah dan industri agar lulusan benar-benar mampu langsung bekerja atau berwirausaha.

Tingginya angka pengangguran terjadi karena tidak seimbang nya kebutuhan dunia kerja dengan ketersediaan tenaga kerja yang berasal dari lulusan SMK (Muzdalifah et al., 2020), Wardhani & Nastiti, (2023) pengangguran didominasi oleh lulusan SMK sebesar 12,56%, diikuti oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 10,32%, lulusan Diploma sebesar 7,54, lulusan Sarjana sebesar 12,65, lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 6,22%, dan lulusan Sekolah Dasar (SD) ke bawah sebesar 2,74% seperti yang digambarkan pada diagram berikut.



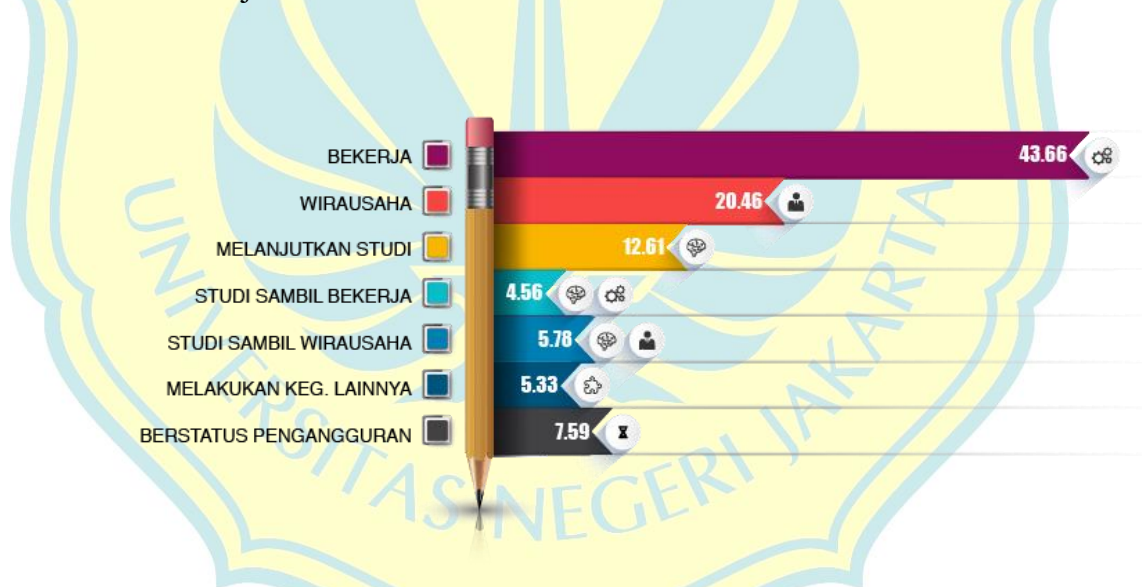
Gambar 1. 2 Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020-2022

Sumber: BPS 2022

Mengingat peran strategis dan tujuan dari SMK PK yang bertujuan mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja, seharusnya tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK, seperti yang tercatat dalam data BPS, tidak terjadi. Untuk itu, SMK sebagai lembaga pendidikan vokasional perlu meningkatkan optimalisasi perannya agar peserta didik menjadi lebih kompeten dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja (Maulina & Yoenanto, 2022). Salah satu indikasi masalah utama adalah ketidaksesuaian antara kurikulum SMK dan kebutuhan dunia kerja, yang sering disebut sebagai *mismatch* (Duhita, 2023).

Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: SMK belum berhasil membekali lulusan dengan pemahaman yang memadai tentang budaya kerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), kurangnya keterlibatan dalam kerja sama yang efektif dengan dunia kerja, fasilitas praktik yang tidak memadai, serta kestabilan internet yang rendah (Widiyanto, 2010; Rojaki et al., 2021; Lisdiantini et al., 2022).

Hasil *tracer study* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (2022) juga mengungkapkan bahwa dari total lulusan SMK secara nasional, sekitar **43,44%** berhasil terserap di dunia kerja, sementara **20,46%** memilih jalur wirausaha. Namun demikian, masih terdapat **7,59%** lulusan yang menganggur, serta sebagian lainnya melanjutkan pendidikan atau tidak melaporkan statusnya. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar lulusan SMK telah bekerja, masih terdapat celah antara kompetensi yang dimiliki lulusan dengan tuntutan dunia kerja.

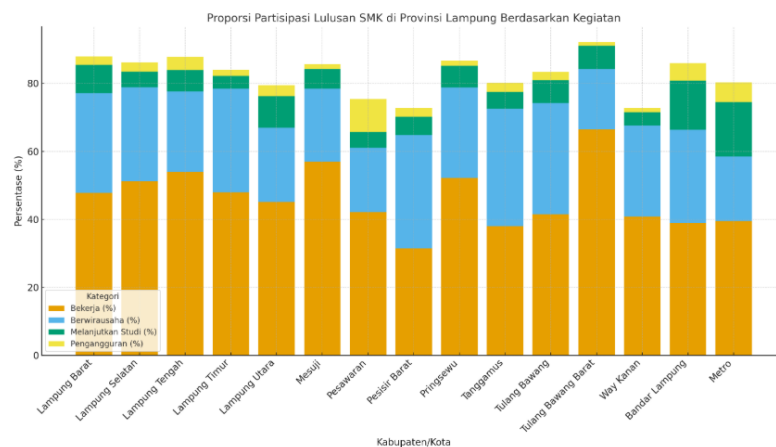


Gambar 1. 3 Hasil *tracer study* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (2022)

Sumber: Kemendikbud, 2022

Tracer study ini melibatkan seluruh lulusan SMK tahun ajaran 2020/2021, semua satuan pendidikan SMK, serta mitra dunia kerja dan industri yang terlibat dalam berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan di SMK. Data tersebut menekankan perlunya penyesuaian kurikulum SMK dengan kebutuhan pasar kerja dan penguatan kolaborasi dengan dunia industri untuk meningkatkan kualitas

lulusan dan mengurangi pengangguran. Selain itu, tracer study ini menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap hasil pendidikan vokasi agar lulusan SMK dapat menjadi lebih kompetitif dan sesuai dengan tuntutan industri (Jedinasrul, 2023).



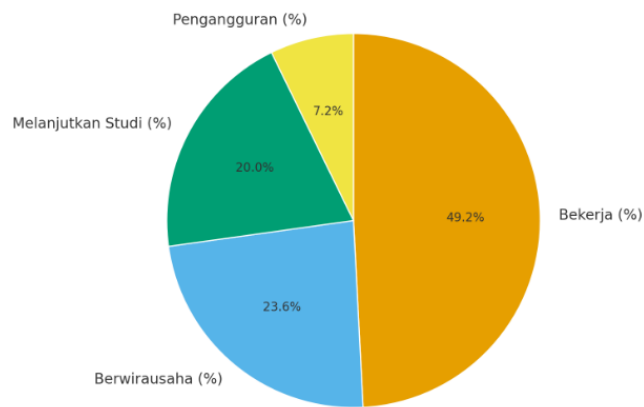
Gambar 1. 4 Hasil tracer study lulusan SMK di provinsi lampung tahun 2023

Sumber: Sukanta, W. (2024)

Berdasarkan data *Tracer Study* SMK Provinsi Lampung Tahun 2024, dari total 48.043 lulusan SMK, sebanyak 39.382 responden mengisi kuesioner dengan tingkat partisipasi sebesar 81,97%. Angka tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan lulusan dalam memberikan informasi mengenai kondisi pasca kelulusan tergolong tinggi. Secara umum, hasil studi menunjukkan bahwa 46,28% lulusan SMK di Provinsi Lampung telah bekerja, 26,27% berwirausaha, 8,05% melanjutkan studi, dan 3,47% berada pada kategori pengangguran. Data ini mengindikasikan bahwa sebagian besar lulusan SMK telah terserap di dunia kerja, baik sebagai pekerja maupun pelaku wirausaha, sesuai dengan orientasi pendidikan vokasi yang menekankan kesiapan kerja.

Khusus di Kota Metro, jumlah lulusan SMK mencapai 3.193 orang dengan jumlah responden 2.962 orang atau tingkat respons 92,77%, yang tergolong tinggi di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. Dari keseluruhan responden, sebanyak 39,5% telah bekerja, 18,97% berwirausaha, dan 16,04% melanjutkan studi. Selain itu, terdapat 3,68% lulusan yang melanjutkan studi sambil bekerja, 5,67% yang melanjutkan studi sambil berwirausaha, serta 10,33% yang melakukan

kegiatan lain. Sementara itu, tingkat pengangguran di Kota Metro tercatat sebesar 5,81%, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi.



Gambar 1. 5 Hasil tracer study lulusan SMK di Kota Metro tahun 2023

Sumber: Sukanta, W. (2024)

Ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), yang dikenal sebagai *skills mismatch*, merupakan salah satu permasalahan mendasar dalam pendidikan vokasi di Indonesia. McGrath (2012) menegaskan bahwa *skills mismatch* menjadi penyebab utama tingginya pengangguran lulusan pendidikan vokasi di negara berkembang. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Handayani dan Prasetyo (2021) yang menunjukkan bahwa kurikulum SMK di Indonesia masih kurang adaptif terhadap dinamika industri, sehingga menghasilkan lulusan yang belum sepenuhnya siap memasuki dunia kerja. Dampak dari kondisi tersebut bersifat sistemik, mulai dari meningkatnya pengangguran terdidik, rendahnya daya saing tenaga kerja, hingga belum optimalnya kontribusi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK) pada tahun 2021. Program ini dirancang sebagai strategi transformasi pendidikan vokasi melalui penguatan kemitraan dengan DUDI, peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana berbasis standar industri, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Implementasi Program SMK PK

mengadopsi konsep *link and match* 8+i, yang menekankan kemitraan strategis antara sekolah dan industri secara berkelanjutan, dengan harapan mampu mengurangi kesenjangan kompetensi dan meningkatkan kualitas serta daya serap lulusan.

Namun demikian, efektivitas Program SMK PK dalam menjawab permasalahan *skills mismatch* dan pengangguran lulusan SMK masih memerlukan kajian yang mendalam. Berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa capaian program tersebut belum sepenuhnya optimal. Data tracer study di Kota Metro mengindikasikan masih adanya lulusan SMK yang belum terserap di dunia kerja, memiliki waktu tunggu kerja yang relatif panjang, atau bekerja pada bidang yang tidak sesuai dengan kompetensi keahliannya. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif Program SMK PK dengan realitas implementasinya di tingkat sekolah.

Secara konseptual, Program SMK PK menekankan penguatan kurikulum berbasis industri, pembelajaran berbasis proyek, *teaching factory*, serta keterlibatan aktif DUDI. Namun dalam praktiknya, berbagai komponen tersebut belum sepenuhnya terintegrasi secara konsisten. Tujuan program yang bersifat umum belum sepenuhnya diturunkan ke dalam indikator keberhasilan yang operasional dan terukur. Selain itu, kesesuaian input program, seperti kompetensi guru, ketersediaan fasilitas praktik berbasis industri, serta dukungan pendanaan, masih menunjukkan variasi antar sekolah. Pada sisi proses, implementasi pembelajaran berbasis proyek, praktik kerja lapangan, dan *teaching factory* telah dilaksanakan, tetapi belum sepenuhnya membentuk budaya kerja industri yang berkelanjutan. Keterlibatan DUDI dalam pembelajaran, pengawasan, dan evaluasi program masih terbatas, sehingga perubahan perilaku profesional guru dan kesiapan kerja peserta didik belum optimal.

Berbagai kajian menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan vokasi sangat ditentukan oleh kejelasan tujuan, relevansi kurikulum, kompetensi guru, ketersediaan sarana praktik, serta keterlibatan industri secara nyata (Darling-Hammond et al., 2017; OECD, 2019). Sebaliknya, lemahnya integrasi budaya industri ke dalam pembelajaran justru memperlebar kesenjangan keterampilan

lulusan (Levels et al., 2014). Nasyaliyah (2023) juga menekankan bahwa kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas pembelajaran menjadi faktor kunci dalam menginternalisasikan budaya kerja industri di sekolah.

Berdasarkan kondisi tersebut, evaluasi Program SMK Pusat Keunggulan di Kota Metro menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan. Evaluasi ini diperlukan untuk menjelaskan mengapa Program SMK PK belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi program, serta menilai dampaknya terhadap kualitas lulusan dan penurunan pengangguran. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model evaluasi CIPTRIK yang mengintegrasikan aspek Context, Input, Process, Behavior, dan Result untuk mengkaji secara komprehensif efektivitas implementasi Program SMK PK dalam meningkatkan kualitas lulusan dan menekan pengangguran lulusan SMK.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang diuraikan maka, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Tingginya angka pengangguran di Indonesia, khususnya di kalangan lulusan SMK.
2. Masih terjadi kesenjangan antara kompetensi lulusan SMK dan belum optimalnya model kemitraan link and match 8+i dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
3. Keterlibatan DUDI dalam implementasi program SMK PK belum konsisten.
4. Ketersediaan kualitas fasilitas termasuk sarana prasarana SMK belum memenuhi standar DUDI.
5. Kompetensi guru dan pelaksanaan pembelajaran berbasis industri masih menghadapi tantangan.
6. Efektivitas Program SMK PK dalam meningkatkan kualitas lulusan belum dapat dibuktikan secara komprehensif.
7. Belum adanya evaluasi sistematis terhadap hasil lulusan program SMK PK.
8. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program SMK PK di Kota Metro

### 1.3 Pembatasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, peneliti berupaya untuk membatasi permasalahan pada evaluasi program SMK PK di Kota Metro dengan model CIPPO dan Kirkpatrick pada aspek context, input, process, product, outcome, behavior dan Result.

### 1.4 Pertanyaan Peneliti

1. Bagaimana mengevaluasi komponen *Context* pada Program SMK Pusat Keunggulan di Kota Metro?
2. Bagaimana mengevaluasi komponen *Input* pada Program SMK Pusat Keunggulan di Kota Metro?
3. Bagaimana mengevaluasi komponen *Process* pada Program SMK Pusat Keunggulan di Kota Metro?
4. Bagaimana mengevaluasi komponen *Behavior* pada Program SMK Pusat Keunggulan di Kota Metro?
5. Bagaimana mengevaluasi komponen *Result* pada Program SMK Pusat Keunggulan di Kota Metro?

### 1.5 Tujuan Penelitian

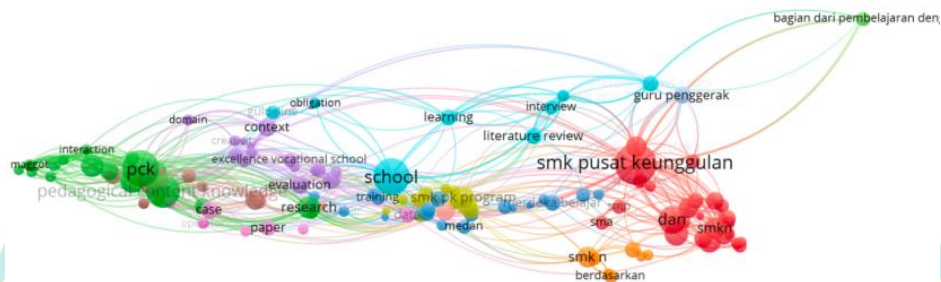
1. Untuk mengevaluasi capaian dan kesesuaian komponen *Context* pada Program SMK Pusat Keunggulan di Kota Metro.
2. Untuk mengevaluasi capaian dan kesesuaian komponen *Input* pada Program SMK Pusat Keunggulan di Kota Metro.
3. Untuk mengevaluasi capaian dan kesesuaian komponen *Process* pada Program SMK Pusat Keunggulan di Kota Metro.
4. Untuk mengevaluasi capaian dan kesesuaian komponen *Behavior* pada Program SMK Pusat Keunggulan di Kota Metro.
5. Untuk mengevaluasi capaian dan kesesuaian komponen *Result* pada Program SMK Pusat Keunggulan di Kota Metro.

### 1.6 *State of The Art* / Kebaruan Penelitian

Pendidikan vokasi merupakan elemen kunci dalam mempersiapkan generasi muda agar memiliki kompetensi dan daya saing di sektor industri. Program SMK Pusat Keunggulan (PK) merupakan inisiatif yang dirancang untuk

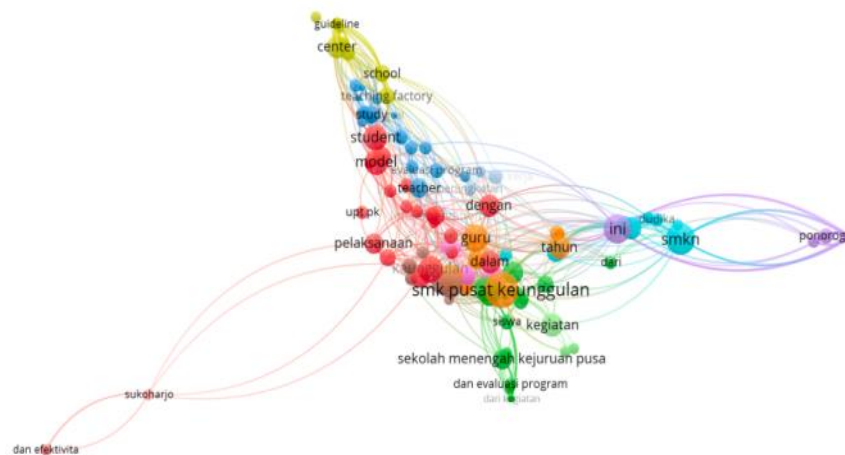
mengembangkan sekolah-sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi khusus, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan performa sekolah-sekolah tersebut.

Terdapat 12 cluster pada *State of The Ar* SMK PK dari 973 link, pada penelitian sebelumnya penelitian banyak membahas tentang kurikulum SMK PK, kurikulum merdeka, kompetensi pendidik dan infrastruktur. *State of The Art* SKM PK sejak tahun 2017-2024 digambarkan sebagai berikut:



*Gambar 1. 6 State of The Ar Evaluasi Program SMK PK*

Terdapat 12 cluster pada *State of The Ar* Evaluasi Program SMK PK dari 1037 link, pada penelitian sebelumnya banyak membahas tentang implementasi kurikulum SMK PK, vokasi, project, kompetensi, keahlian, Teknologi, karir. *State of The Art* SKM PK sejak tahun 2017-2024 adalah sebagai berikut:



*Gambar 1. 7 Evaluasi Program SMK PK*

Berdasarkan kajian penelitian sumber daya sekolah periode 2016–2024, terdapat lima klaster utama dengan dominasi pembahasan pada aspek sumber daya manusia, kepemimpinan kepala sekolah, dan manajemen pendidikan. Analisis state of the art menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih bersifat parsial. Sangat sedikit kajian yang mengintegrasikan dua model evaluasi, khususnya CIP dan Kirkpatrick, melakukan evaluasi komprehensif berbasis satuan pendidikan, serta menelaah dampak nyata program terhadap lulusan dan dunia kerja. Kesenjangan ini menegaskan pentingnya penelitian evaluatif yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil riil, khususnya dalam konteks Program SMK Pusat Keunggulan.

Dalam kajian state of the art evaluasi pendidikan vokasi, penelitian mutakhir menekankan bahwa evaluasi program pendidikan vokasi harus menggabungkan dimensi kesiapan konteks, input, proses, perubahan perilaku, dan dampak nyata lulusan. Penelitian sebelumnya, seperti oleh Cahyadi et al. (2025), menggunakan model evaluasi CIPP untuk menilai efektivitas kemitraan sekolah–industri pada SMK di bidang teknik, dan menemukan bahwa keterlibatan mitra industri dalam berbagai komponen evaluasi sangat penting untuk meningkatkan relevansi pembelajaran vokasional. Namun, penelitian tersebut masih terbatas pada aspek kesiapan dan pelaksanaan program (Context, Input, Process), sehingga perubahan perilaku guru dan peserta didik serta hasil nyata lulusan belum menjadi fokus utama.

Selain itu, Wulandari et al. (2025) menegaskan bahwa evaluasi pendidikan vokasi di era global dan teknologi memerlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari analisis konteks hingga dampak nyata lulusan, agar dapat mengidentifikasi tantangan terkait fasilitas, kompetensi pendidik, dan kesiapan lulusan menghadapi Industri 4.0 dan Society 5.0.

Penelitian empiris lain juga menunjukkan bahwa kompetensi vokasional yang diukur lewat model evaluatif sangat berkaitan dengan *mismatch* antara kompetensi yang diperoleh lulusan dan kebutuhan industri, yang berdampak pada niat untuk keluar dari program pendidikan atau pasar kerja yang kurang menyerap lulusan secara optimal.

Dengan demikian, arah penelitian untuk menggabungkan CIP (Context–Input–Process) dan komponen Behavior–Result dari Kirkpatrick tidak hanya konsisten dengan tren evaluasi pendidikan vokasi saat ini, tetapi juga mencerminkan kebutuhan metodologis untuk menangkap output sekaligus outcome dari program vokasi secara utuh di tengah dinamika dunia kerja yang cepat berubah.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada pengembangan dan penerapan model evaluasi terintegrasi CIP–Behavior–Result (CIPTRIK), yaitu integrasi antara model CIP (Context, Input, Process) dengan komponen Behavior dan Result yang diadaptasi dari model evaluasi Kirkpatrick dalam konteks Program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK). Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya mengevaluasi SMK PK secara parsial, misalnya hanya pada aspek input, implementasi kurikulum, atau capaian output jangka pendek penelitian ini menelusuri jalur sebab-akibat secara komprehensif dari konteks dan input program hingga perubahan perilaku aktor pendidikan dan hasil akhir lulusan melalui analisis jalur (path analysis).

Kebaruan penting lainnya terletak pada penempatan variabel Relevansi Kurikulum dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) sebagai variabel mediasi. Variabel ini tidak diposisikan sekadar sebagai input atau proses, tetapi sebagai mekanisme penghubung yang menjelaskan bagaimana faktor-faktor program memengaruhi kualitas lulusan. Temuan mengenai lemahnya, bahkan negatifnya, pengaruh mediasi memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan karena menunjukkan bahwa peningkatan fasilitas, kompetensi guru, dan komitmen profesional guru tidak secara otomatis meningkatkan kualitas lulusan apabila tidak diiringi dengan penyelarasan kurikulum yang autentik dengan kebutuhan riil industri.

Selain itu, penelitian ini menghadirkan kebaruan konseptual melalui penguatan dimensi behavior sebagai jembatan antara kebijakan dan hasil (result). Dimensi behavior direpresentasikan oleh komitmen profesional guru, sedangkan dimensi result diperkuat melalui hasil tracer study lulusan. Berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya memanfaatkan tracer study secara deskriptif, penelitian ini memosisikannya sebagai indikator evaluatif perilaku dan hasil program,

sehingga memberikan perspektif baru dalam evaluasi pendidikan vokasi berbasis kebijakan nasional.

Dengan demikian, kontribusi ilmiah penelitian ini tidak hanya terletak pada temuan empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas lulusan SMK PK, tetapi juga pada pengayaan model evaluasi program pendidikan vokasi yang lebih integratif, kontekstual, dan berbasis perilaku serta hasil nyata. Model CIPTRIK yang dikembangkan dapat digunakan sebagai kerangka evaluasi alternatif bagi pemerintah, sekolah, dan peneliti dalam menilai efektivitas program SMK PK maupun kebijakan pendidikan vokasi lainnya secara lebih mendalam dan berbasis bukti.

Penelitian ini juga menawarkan kebaruan pendekatan evaluasi melalui penerapan evaluasi yang holistik dan kontekstual dalam menilai efektivitas Program SMK Pusat Keunggulan. Pendekatan holistik dilakukan dengan mengintegrasikan konteks, input, dan proses dengan perilaku aktor pendidikan (behavior) serta hasil lulusan (result), sehingga evaluasi tidak berhenti pada aspek administratif atau implementatif, tetapi menilai dampak nyata program secara utuh.

Pendekatan kontekstual dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil masing-masing SMK, seperti karakteristik peserta didik, ketersediaan fasilitas, tingkat keterlibatan DUDI, serta dinamika pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu, evaluasi tidak disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan realitas lapangan. Pendekatan ini menghasilkan temuan yang lebih relevan, realistis, dan aplikatif, serta dapat digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan praktik penyelenggaraan SMK PK secara berkelanjutan.